

KONTESTASI WACANA POLITIK IDENTITAS DALAM RUANG DIGITAL MENJELANG PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Iriyani Astuti Arief¹, Indra Lestari², Yunita Simatupang³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo Kendari

Correspondent author: iriyani.arief@uho.ac.id

Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Abstract

This research aims to identify and analyze the contestation of identity political discourse has developed in society digital space ahead of the election for Governor of Southeast Sulawesi. In this research theory that used are framing theory, the concept of public space, and the identity politics concept to find out why the community selects Governor. Identity politics can arise based on a society's ethnicity, religion, and culture. This is significant since the rise in community political participation in Southeast Sulawesi is heavily influenced by tribal factors. Meanwhile, the data collection technique used literature study with data analysis techniques that include three stages Data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research findings that the constestation of identity political discourse in the digital space ahead of the election for Governor of Southeast Sulawesi showed that there dynamics in the use of digital space, especially on social media facebook and instagram. The tribal phenomenon has become a hot topic of discussion in the digital space, as showed by the comments of supporters of the three gubernatorial candidates, namely Andi Sumangerukka (ASR), a Bugis tribe, Kery Saiful Konggoasa (KSK), and Lukman Abunawas (LA) a tolaki tribe. The tribal public mindset of Kendari city people can determine the map of political power, making them to select who is most ideal to be a leader in Southeast Sulawesi.

Keywords: Contestation; Digital Space; Identify Political; Governor election

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kontestasi wacana politik identitas yang berkembang pada masyarakat melalui ruang digital menjelang pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara pada 2024. Dalam penelitian ini menggunakan teori *framing*, konsep ruang publik dan konsep politik identitas untuk melihat apa yang melatar belakangi masyarakat dalam memilih Gubernur. Politik Identitas disini bisa timbul berdasarkan suku, agama, dan budaya dari sebuah masyarakat. Hal ini menarik untuk diketahui mengingat meningkatnya partisipasi politik masyarakat di Sulawesi Tenggara banyak dipengaruhi oleh faktor kesukuan. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dengan teknik analisis data yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan bahwa kontestasi wacana politik identitas dalam ruang digital menjelang pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara, menunjukkan adanya dinamika dalam penggunaan ruang digital khususnya media sosial *Facebook* dan *Instagram*. Fenomena kesukuan menjadi perbincangan panas dalam ruang digital, yang terlihat dalam komentar-komentar pendukung dari tiga bakal calon gubernur yakni Andi Sumangerukka (ASR) yang bersuku Bugis, Kery Saiful Konggoasa (KSK), dan Lukman Abu Nawas (LA) yang berasal dari suku asli Sulawesi Tenggara yakni Suku Tolaki. *Public mindset* kesukuan masyarakat kota Kendari dapat menentukan peta kekuatan politik, sehingga bisa menentukan siapa yang dianggap paling cocok menjadi pemimpin di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kata Kunci: Kontestasi; Pemilihan Gubenur; Politik Identitas; Ruang Digital

PENDAHULUAN

Negara dengan pluralisme cenderung menunjukkan perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, seperti agama, suku, etnis, dan budaya. Keseluruhan perbedaan ini bisa menimbulkan perbedaan pilihan politik bagi setiap individu. Negara dengan sistem demokrasi yang baik bisa mengakomodir perbedaan-perbedaan tersebut, karena dalam sistem demokrasi terdapat Hak dan kebebasan dalam memilih tidak peduli seseorang tersebut berasal dari suku, agama, atau etnis tertentu. Dalam demokratisasi mendorong timbulnya strategi politik bagi golongan tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari suku atau agama tertentu, yang biasa dikenal dengan istilah politik identitas.

Menurut Lukmantoro (2008) politik identitas adalah politik yang bertujuan untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan. Politik identitas dimaknai sebagai sebuah konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subyek dalam ikatan sebuah komunitas politik (Haboddin, 2012). Politik identitas juga dapat dipahami sebagai sebuah perjuangan untuk menemukan bentuk hukum, politik, dan konstitusional yang tepat untuk mengakui dan mengakomodasi identitas atau kebangsaan sebuah individu, imigran dan pengungsi, perempuan, gay, lesbian, bahasa, etnis, budaya, daerah, dan agama minoritas. Dalam konteks politik di Indonesia, politik identitas lebih terikat dengan etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing (Maarif, 2010).

Dalam ranah politik praktis, identitas sering diterapkan sangat jauh dari nilai-nilai persatuan dan kesatuan, dan hanya digunakan sebagai alat politik saja. Seperti untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilu, dan mendapatkan dukungan massa, ataupun dengan tujuan-tujuan politis lainnya, seperti keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Politik identitas merupakan fenomena politik yang fokus terhadap perbedaan identitas. Dimana dalam perbedaan identitas tersebut dapat dijadikan strategi politik bagi para elit politik dalam mendapatkan dukungan. Misalnya dalam pemilihan Kepala Daerah, Walikota dan Gubernur.

Wilayah Indonesia terdiri dari 38 Provinsi dengan suku, agama, dan budaya yang beraneka ragam. Kemajemukan ini menimbulkan politik identitas yang sekaligus digunakan sebagai strategi politik bagi bakal calon Gubernur dalam meraup suara terbanyak. Seperti yang terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menghadapi Pemilu Gubernur tahun 2024 mendatang, dimana provinsi ini memiliki fondasi kesukuan yang sangat kuat dalam bidang politik. Hal ini dapat dilihat dalam pemilihan calon Gubernur, masyarakat sangat mengutamakan dan melihat suku dari Bakal Calon (Balon) Gubernur yang akan dipilih. Berdasarkan hasil survei lembaga *Script Survei* Indonesia (SSI) menyebutkan ada 3

nama yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi dalam Pemilihan Gubernur di Sulawesi Tenggara, yakni Kery Saiful Konggoasa, Lukman Abunawas, dan Andi Sumangerukka.

Ketiga bakal calon gubernur tersebut memiliki identitas yang berbeda-beda. Dua calon Gubernur tersebut merupakan putra daerah Sulawesi Tenggara yakni Kery Saiful Konggoasa dan Lukman Abunawas. Keduanya juga berasal dari suku yang sama, yakni suku Tolaki yang merupakan suku asli dari Sulawesi Tenggara. Adapun Andi Sumangerukka berasal dari Makassar dan bersuku Bugis. Jika dilihat dari ketiga calon Gubernur tersebut dengan latar belakang identitas yang berbeda, tidak mungkin seseorang yang berasal dari luar Sulawesi Tenggara mampu bersaing dengan Putra asli Daerah. Namun dengan munculnya nama Andi Sumangerukka menunjukkan peran dari politik identitas itu sendiri, yang dijadikan strategi politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, khususnya yang berasal dari suku Bugis.

Strategi politik yang digunakan Andi Sumangerukka (ASM) dengan memanfaatkan politik identitas, dimana ASM yang berasal dari 'Selatan' dan bersuku Bugis yang banyak ditemukan di beberapa Kabupaten di Sulawesi Tenggara. Hal inilah yang menyebabkan ASM mendapatkan banyak pendukung dari warga masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara, Konawe Selatan, dan juga di Kota Kendari (Abeli, Nambo, dan Poasia). Antusias masyarakat dalam mendukung ASM sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara, dilakukan dengan berbagai macam cara, ada yang secara langsung datang pada saat ASM mengadakan kunjungan, ataupun dengan cara menggunakan ruang digital yakni Media Sosial (*Facebook, Instagram*), kemudian memberikan komentar-komentar ataupun menuliskan status dukungan terhadap pencalonan Andi Sumangerukka sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara pada Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang.

Pemanfaatan ruang digital sebagai alat kampanye untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya tidak hanya dilakukan oleh ASM, namun juga digunakan oleh dua bakal calon lainnya yakni Lukman Abunawas dan Kery Saiful Konggoasa. Konsep ruang publik sendiri merupakan hasil pemikiran Jurgen Habermas (1989) dalam karyanya "Perubahan Struktural ruang publik; Sebuah kajian tentang Masyarakat Borjouis". Ruang publik baginya adalah suatu ruang yang menjembatani interaksi negara dengan masyarakat sipil. Ruang ini merupakan merupakan ruang universal, dimana orang-orang berkumpul untuk mendiskusikan apa yang perlu di diskusikan. Berangkat dari pemikiran tersebut, munculah istilah ruang digital yang berfungsi sebagai lokasi dalam jagat maya pertemuan tanpa tatap muka.

Penelitian ini menggunakan konsep politik identitas, konsep ruang publik, dan teori analisis *Framing* untuk menganalisis kontestasi wacana politik identitas dalam ruang digital menjelang pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024. Mengenai konsep *framing*

sendiri ditulis Robert N. Eintmen (1993) dalam sebuah artikel dalam *Journal of Political Communication* dan di tulisan lainya yang menerapkan konsep itu dalam studi kasus pemberitaan media. *Framing concept* oleh Entman, dipergunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan memperlihatkan aspek tertentu dari realitas oleh media masa termasuk dalam ruang digital atau dunia maya. *Framing* dapat dilihat sebagai penempatan informasi dalam konteks khusus sehingga isu tertentu mendapatkan perhatian lebih daripada isu yang lainya. *Framing* sendiri merupakan kegiatan mengemas suatu peristiwa dengan misi pembentukan opini atau menggiring persepsi publik terhadap suatu peristiwa. *Framing* bukan mengarang cerita, tetapi lebih kepada menekankan sebuah aspek melalui penyeleksian informasi, penonjolan aspek eksklusif, pemilihan istilah, gambar serta meniadakan informasi yang seharusnya disampaikan. *Framing* sendiri bertujuan membingkai sebuah informasi agar melahirkan citra, kesan, makna eksklusif yang diinginkan, atau wacana yang akan di tangkap khalayak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan kajian literatur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset pustaka (*library research*) dan dokumentasi. Riset pustaka dimana peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan buku-buku, jurnal *online* yang mendukung analisis penelitian, sehingga diperoleh hasil yang valid. Adapun dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui berita resmi berupa dokumen resmi, dan media digital (*facebook, instagram*) berupa hasil tangkapan gambar kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep dan teori yang terkait dengan kontestasi wacana politik identitas dalam ruang digital menjelang pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara.

Analisis data yang menggunakan konsep politik identitas, ruang publik (digital), dan teori *framing* dilakukan setelah keseluruhan daya lengkap dikumpulkan. Teknik analisis data yang dimaksud akan diagregasi, diorganisir lalu diklarifikasikan menjadi bagian-bagian yang dapat dianalisis. Adapun perbaikan data dilakukan untuk menyempurnakan dan menguatkan data yang telah dikumpulkan. Setelah itu, informasi dan data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara rinci dan mendalam dengan menggunakan kerangka teori yang telah dijabarkan pada tinjauan pustaka. Analisis data dan informasi pada penelitian ini dilakukan melalui 3 tahapan yakni ; reduksi informasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan informasi serta temuan baru yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai wacana politik identitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini memaparkan hasil penelitian sekaligus pembahasan yang dianalisis menggunakan konsep ruang publik (digital), politik identitas, dan teori *framing* dalam ruang digital. Dari hasil analisis ditemukan bahwa media sosial kini merupakan tempat untuk orang berinteraksi tentang banyak hal, seperti halnya ruang publik dimana orang-orang bertemu dan berinteraksi, media sosial seperti *facebook* dan *instagram* juga merupakan ruang publik yang beralih ke ranah digital atau ruang digital.

Pemanfaatan Ruang Digital sebagai Ruang Publik

Ruang publik digital lahir dari perkembangan teknologi. Seiring dengan itu lahir pula apa yang disebut identitas digital. Setiap individu memiliki banyak identitas dan bisa memilih identitas seperti apa yang ingin ditampilkan dalam ruang digital. Contohnya seseorang yang memiliki akun *facebook* yang berbeda nama. Perbedaan tersebut di ibaratkan, seorang yang memiliki banyak topeng atau persona identitas digital. Beberapa Bakal Calon Gubernur Sulawesi Tenggara yakni Kery Saiful Konggoasa, Andi Sumangerukka, dan Lukman Abunawas juga memiliki akun *facebook* dan *Instagram* yang digunakan untuk berbagi informasi seputar kegiatan mereka. Selain sebagai identitas dalam dunia virtual atau digital, *facebook* dan *Instagram* juga merupakan wadah untuk berkomunikasi antar para pendukung bakal calon Gubernur Sulawesi Tenggara. Hal itu dapat dilihat dari puluhan bahkan sampai ratusan komentar dari partisan dan simpatisan dalam setiap setiap postingan *facebook* maupun *instagram* para calon.

Ruang digital seperti *facebook* dan *Instagram* kini banyak digunakan oleh masyarakat selain sebagai tempat membangun identitas virtual juga dijadikan sebagai sarana menyampaikan pendapat atau berdiskusi tentang suatu topik. Demikian juga dengan Bakal calon Gubernur Sulawesi Tenggara yang memanfaatkan kedua *Platform* tersebut untuk membangun Identitas Virtual, menginformasikan setiap kegiatan yang mereka lakukan, bahkan menjadi wadah diskusi para pendukung mereka. Hal tersebut dapat di lihat dari postingan *Facebook* maupun *Instagram* mereka yang ramai mendapatkan komentar dari para simpatisan, seperti gambar 1.

Gambar 1. Postingan Instagram Akun Andi Sumagerukka



Sumber : Instagram.com (2023)

Melihat akun *Instagram* salah satu Bakal Calon Gubernur Sultra yakin Andi Sumangerukka (ASR), dalam akun *official* nya cukup aktif memposting kegiatan yang dilakukan dan selalu ramai di beri komentar oleh para pendukung. Fitur komentar selalu ramai dengan dukungan, pendapat atau pemikiran masyarakat tentang ASR, tidak jarang juga ada yang menyuarakan tentang hal-hal yang tidak disukai dari ASR. Melihat hal ini, jika Kembali kepada konsep Habermas, yang menyebutkan ruang publik sebagai sarana untuk berdiskusi maka *platform* seperti *Facebook* maupun *Instagram* juga merupakan ruang publik yang terjadi secara virtual atau lebih dikenal dengan ruang digital.

Framing dalam Ruang Digital

Framing atau media *framing* menjadi topik hangat terkait isu sosial politik akhir-akhir ini. *Framing* sendiri merupakan kegiatan mengemas suatu peristiwa dengan misi pembentukan opini atau menggiring persepsi publik terhadap suatu peristiwa. *Framing* bukan mengarang cerita, tetapi lebih kepada menekankan sebuah aspek melalui penyeleksian informasi, penonjolan aspek eksklusif, pemilihan istilah, gambar serta meniadakan informasi yang seharusnya disampaikan. *Framing* sendiri bertujuan membingkai sebuah informasi agar melahirkan citra, kesan, makna eksklusif yang diinginkan, atau wacana yang akan di tangkap khalayak. Jika melihat lebih dalam media sosial tiga Bakal calon Gubernur Sulawesi Tenggara yakni Kery Saiful Kongoosa (KSK), Andi Sumangerukka (ASR), dan Lukman Abunawas (LA), setiap postingan baik di *Facebook* maupun *Instagram* selalu ada informasi tertentu yang ingin di tonjolan atau di bingkai (*framing*). Sebagai contohnya dapat dilihat dalam salah satu postingan akun *Instagram* Andi Sumangerukka berikut.

Tidak jauh berbeda dengan postigan *Instagram* ASR, bakal calon Gubernur lainnya juga ada yang memasukkan unsur-unsur kedaerahan meskipun tidak secara langsung dalam postingannya, tetapi dapat dilihat dari komentar-komentar simpatisan. Beberapa

komentar mereka secara tersirat menekankan yang mereka dukung merupakan putra daerah asli Sulawesi Tenggara, dan siap menjadi pemimpin Sulawesi Tenggara di masa depan. Seperti yang dapat kita lihat dalam *postingan facebook* salah satu bakal calon Gubernur Sulawesi Tenggara.

Gambar 2. Postingan Akun Facebook Kery Saiful Konggoasa



Sumber: facebook.com (2023)

Dari postingan diatas, meskipun tidak secara langsung mengatakan bahwa yang bersangkutan sebagai putra daerah asli Sulawesi Tenggara, tetapi gambar diatas secara tersirat ingin menunjukkan bahwa beliau putra daerah. Dari foto mereka mencoba membingkai (*framing*) KSK sebagai putra daerah Konawe. Seperti yang diketahui bahwa Kabupaten Konawe merupakan daerah yang penduduknya mayoritas suku Tolaki, dan juga dikenal sebagai salah satu suku asli Sulawesi Tenggara. Dengan melakukan *framing* tersebut, harapannya adalah semua wajib pilih yang merupakan putra-putri asli Sulawesi Tenggara ikut mendukung KSK. Hal ini juga di dukung dengan komentar-komentar para partisan dan simpatisan yang menggunakan Bahasa daerah tolaki. Penggunaan Bahasa daerah tolaki dalam komentar-komentar *postingan facebook* KSK semakin mempertegas *framing*-nya sebagai putra daerah dan bersuku Tolaki, dengan harapan bahwa para wajib pilih yang bersuku Tolaki bisa saling mendukung sesama putra asli daerah.

Kontestasi Wacana Politik Identitas dalam Ruang Digital Menjelang Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024

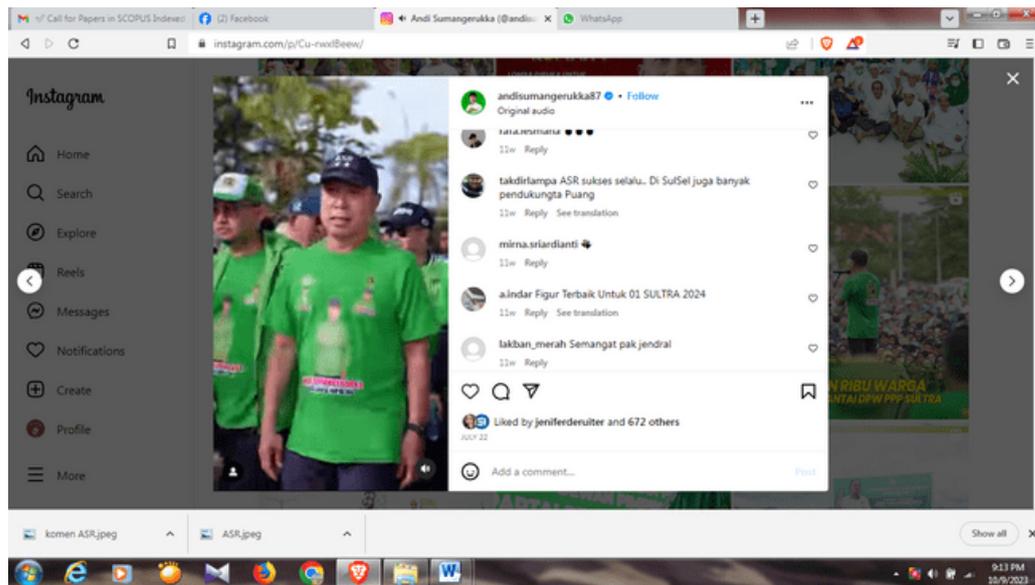
Politik identitas berbeda dengan identitas politik maupun politisasi identitas. Identitas politik lebih diartikan sebagai sebuah konstruksi yang menentukan posisi kepentingan

subyek di dalam ikatan suatu komunitas politik (Haboddin, 2012). Sedangkan, politisasi identitas dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menggunakan, mengeksploitasi, atau memanipulasi identitas, baik berdasarkan agama, etnis, atau ketaatan pada ideologi tertentu, untuk menciptakan opini atau menstigmatisasi masyarakat demi keuntungan politik (Herdiansah, 2017). Politik identitas juga dapat dipahami sebagai sebuah perjuangan untuk menemukan bentuk hukum, politik, dan konstitusional yang tepat untuk mengakui dan mengakomodasi identitas atau kebangsaan sebuah individu, imigran dan pengungsi, perempuan, gay, lesbian, bahasa, etnis, budaya, daerah, dan agama minoritas. Dalam konteks politik di Indonesia, politik identitas lebih terikat dengan etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing (Maarif, 2010).

Tidak kalah menarik adalah fenomena politik identitas yang semakin mendominasi percakapan di media sosial menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA), yang menurut rilis dari KPU RI jadwal pemilihan kepala daerah akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Para kandidat bakal calon yang akan mengikuti pesta demokrasi lima tahunan ini sudah mulai mempersiapkan dirinya untuk menarik simpati dari kelompok masyarakat dengan berbagai macam pendekatan politik. Tidak ketinggalan bakal calon Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara sudah mulai memanaskan mesin politik untuk bertarung pada pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak tahun 2024 mendatang. Berdasarkan pengamatan dari penulis di media sosial *Facebook* dan *Instagram*, setidaknya ada tiga bakal calon yang aktif melakukan sosialisasi di media sosial untuk menunjukkan keseriusan mereka dalam meraih simpati publik, guna memperebutkan kursi Gubernur di daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia ini. Ketiga figur tersebut berasal dari suku yang berbeda. Figur pertama yang sering diperbincangkan oleh publik di media sosial (*Facebook* dan *Instagram*) adalah Andi Sumangeruka dengan Akronim (ASR).

Gambar 3. Tangkapan layar dari Media Sosial milik ASR





Sumber : Facebook dan Instagram 2023

Dari tangkapan layar akun media sosial milik Andi Sumangerukka terlihat betapa masifnya sosialisasi yang dilakukan, dengan tujuan untuk memperkenalkan diri, maupun menarik simpati masyarakat Sulawesi Tenggara. Fenomena yang menarik adalah Andi Sumangerukka merupakan figur pendatang atau bukan orang asli dari Sulawesi Tenggara. Di bandingkan dengan kompetitornya yang merupakan putra asli daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Lukman Abunawas (LA) dan Kerry Saiful Konggoasa (KSK). Setidaknya dua nama ini adalah yang sering disebut oleh masyarakat yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah Sulawesi Tenggara yang akan datang. Melihat dari hasil tangkapan layar media

sosial milik ASR terjadi percakapan secara simplifikasi memberikan semangat bangkitnya rasa kesukuan bagi orang Bugis yang menetap dan hidup di daerah Sulawesi Tenggara. Sehingga mereka merasa bangga jika ada perwakilan dari orang bugis yang bertarung memperebutkan kursi Gubernur Sulawesi Tenggara, dan tentunya mereka akan memberikan dukungan penuh. Fenomena kesukuan dalam kontetstasi pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara bukan hal baru, praktik ini sudah mulai terlihat sejak masa pemerintahan La Ode Kaimuddin (alm) sebagai Gubernur Sultra ke-VII, belau sebagai masyarakat kepulauan (Muna) mencari kolega politik melewati pertimbangan kualitas dan kapasitas individu yang memiliki status sebagai masyarakat daratan (Kota Kendari/Tolaki).

Praktik politik identitas Muna/Buton, Tolaki-Bugis, atau masyarakat sering menyebutnya sebagai pertarungan Figur Daratan – Kepulauan. Hal ini juga terlihat pada perhelatan pemilu tahun 2018 saat calon Gubernur dan wakil Gubernur adalah perpaduan figur kepulauan (Muna/Buton) dan daratan (Tolaki). Pasangan Ali Mazi (Kepulauan/Buton-Muna) dan Lukman Abunawas (Daratan/Tolaki), pasangan Asrun (Daratan/Tolaki) dan Hugua (Buton), serta pasangan Rusda Mahmud (Daratan/Bugis) dan Syafei Kahar (Kepulauan/Buton), dan perpaduan unsur suku Muna/Buton dan Tolaki dianggap sebagai kekuatan yang ideal untuk memenangkan pertarungan pada pemilihan kepada daerah tingkat provinsi. *Public Mindset* tentang kesukuan dalam melihat peta kekuatan bakal calon Gubernur sudah terpatri dialam bawah sadar pemilih dalam menentukan kandidat yang akan dipilih di bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemilih yang berasal dari Suku Tolaki kecil kemungkinan akan memilih figur yang tidak ada perwakilan suku Tolaki dikertas Suara. Begitupun suku Bugis, kecil kemungkinan untuk menjatuhkan pilihan kepada pasangan yang bukan berasal dari perwakilan suku Bugis, dan rantai kesukuan ini menjadi budaya yang susah untuk di kikis dengan pendekatan Rasional.

Isu kesukuan ini bukan saja menjadi perbincangan yang menarik di darat, tetapi dengan perkembangan teknologi arus informasi yang berkembang sangat cepat, para relawan, pengusung, maupun simpatisan figur Bakal Calon memanfaatkan media sosial seperti *facebook* dan *instagram* untuk memperkuat isu kesukuan tersebut. Fenomena kesukuan ini menjadi perbincangan menarik di media sosial, hal ini terlihat di akun media sosial milik Andi Sumangerukka (ASR). Mereka menyambut dengan hangat kehadiran ASR yang dikenal sebagai perwakilan dari suku Bugis untuk bertarung dalam pemilihan kepala daerah Sulawesi Tenggara tahun 2024. Politik kesukuan merupakan varian politik identitas ini, sering digunakan untuk memperkuat persepsi diri dan kelompok, dan memiliki dampak besar pada dinamika politik. Salah satu dampak politik identitas di media sosial adalah pembentukan kelompok-kelompok yang kuat dan saling mendukung. Individu dengan identitas politik yang serupa cenderung berkumpul dan membentuk komunitas *online* yang

kuat. Hal ini memungkinkan mereka untuk berbagi pandangan politik, strategi, dan bahkan menggerakkan aksi politik bersama. Di sisi lain, politik identitas di media sosial juga dapat memperdalam polarisasi politik. Ketika individu terlalu fokus pada identitas politik, maka mereka cenderung mengabaikan argumen dari pihak lain dan menjadi lebih keras kepala dalam keyakinan mereka sendiri. Ini dapat menghambat dialog yang konstruktif dan merusak kemungkinan untuk mencapai kesepakatan politik.

Begitupun dari Figur yang berasal dari Daratan yang di simplifikasikan sebagai perwakilan suku Tolaki, yang juga perbincangan kesukuaan menjadi menu menarik. Hal ini dapat di lihat secara jelas di akun Facebook dan Instagram milik Kery Saiful Konggoasa (KSK) sebagai berikut.

Gambar 4. Tangkapan layar akun media sosial milik Kery Saiful Konggoasa (KSK)



Sumber : Facebook, 2023

Dari hasil tangkapan layar akun media sosial milik Kery Saiful Konggoasa (KSK), terlihat perbincangan simpatisan dengan semangat primordial kesukuan yang kental dalam menyambut figur kandidat dari perwakilan suku Tolaki ini, untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur yang akan datang. Komentar salah satu simpatisan Udin Ugi, kurang lebih dapat diartikan : "Pokoknya tolaki, harus kita bersatu. Supaya menjadi no 1 pak KSK. Menjadi pemerintah di Kampung atau di daerah kita, Kendari. Salam Bersatu"

Dari percakapan tersebut, dapat dilihat bahwa media sosial memberikan individu platform untuk mengekspresikan identitas politik mereka dengan lebih mudah dan cepat, daripada dalam kehidupan nyata. Mereka dapat menggunakan tagar, gambar profil, dan postingan untuk menyampaikan dukungan terhadap kandidat atau isu tertentu yang sesuai dengan identitas politik mereka. Hal ini juga sering dimanfaatkan oleh politisi yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah. Mereka dapat menargetkan pesan-pesan khusus kepada kelompok-kelompok dengan identitas politik tertentu, dengan tujuan

memenangkan dukungan dan suara dalam pemilihan. Fenomena ini tidak terlepas dari peran algoritma media sosial yang cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi dan identitas politik pengguna. Ini dapat menciptakan gelembung informasi, di mana individu hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan identitas mereka sendiri.

Politik identitas di media sosial juga memainkan peran penting dalam pergerakan sosial dan advokasi. Kelompok-kelompok dengan identitas politik yang kuat sering menggunakan *platform* ini untuk menggalang dukungan dan menyebarkan pesan mereka, baik untuk perubahan sosial atau politik. Dengan berkembangnya isu politik identitas secara *massive* dalam ruang publik melalui media sosial, dapat memunculkan berbagai kritikan diantaranya adalah penyalahgunaan informasi dan penyebaran berita palsu yang merugikan kelompok tertentu. Identitas politik dapat memicu persepsi bias dalam penilaian terhadap berita dan informasi.

Penting untuk diingat bahwa identitas politik bukanlah satu-satunya aspek yang memengaruhi pandangan seseorang. Individu memiliki latar belakang dan pengalaman yang beragam, yang juga memainkan peran dalam pembentukan pandangan politik mereka. Politik identitas di media sosial adalah fenomena kompleks yang memiliki dampak besar pada dinamika politik. Sementara itu dapat memperkuat komunitas dan pergerakan sosial, juga perlu diwaspadai potensi polarisasi dan pembentukan gelembung informasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang cara politik identitas beroperasi di media sosial, kita dapat mengembangkan pendekatan yang lebih seimbang dalam berpartisipasi dalam percakapan politik di dunia digital.

Gambar 5. Tangkapan layar akun Media Sosial Milik LA



Sumber : Facebook, 2023

Figur selanjutnya yang menjadi bakal calon Gubernur Sulawesi Tenggara dalam pemilu 2024 mendatang, adalah Lukman Abunawas yang dikenal dengan akronim LA.

Beliau merupakan putra asli daerah Sulawesi Tenggara dan ber suku Tolaki. Sama halnya dengan KSK yang populer di kalangan Daratan, karena bersuku tolaki. LA bukan pemain baru dalam dunia perpolitikan. Beliau juga pernah menjadi Wakil Gubernur pada masa pemerintahan Ali Mazi (2018-2023). Sehingga LA sudah cukup dikenal oleh masyarakat, karena berasal dari suku Tolaki yang notabene adalah suku mayoritas di Sulawesi Tenggara. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa komentar pendukung Kpas Boondo, dengan menggunakan bahasa Tolaki, di akun resmi Facebook milik LA, kurang lebih memiliki arti : "Waktunyami semua anak-anak turun, semua orang mari bergandengan tangan,bersatu,mendukung orang tua kita dng keluarga dorang bapaknya Arni,supaya dia jadi Gubernur tahun 2024 nanti".

Melihat komentar-komentar para simpatisan di akun media sosial Facebook milik LA, menunjukkan bahwa LA mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat yang berasal dari suku Tolaki. Sesuai dengan pemahaman dari politik identitas itu sendiri, bahwa politik identitas lebih fokus pada aktivitas seseorang dalam berpartisipasi untuk memobilisasi pengalaman, masalah politik, dan tujuan mereka berdasarkan nilai-nilai identitas kelompok. Sama halnya dengan komentar-komentar yang muncul ini menampilkan nilai-nilai identitas dari beberapa orang yang bersuku Tolaki. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa penggunaan ruang digital, dapat digunakan sebagai wadah untuk mendukung dan menjatuhkan bakal calon tertentu dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara mendatang. Hal ini dapat dilihat dari satu postingan dengan menggunakan bahasa tolaki : "*auto lowo keu onngo pewiso mendua*" yang artinya : "*kamu akan hancur jika masuk kembali*".

Dari komentar ini, dapat dipahami bahwa penggunaan ruang digital dalam hal ini facebook, bukan hanya digunakan untuk mendukung pasangan calon tertentu dengan menggunakan kalimat-kalimat positif, tetapi bisa juga berupa kalimat-kalimat negatif yang bertujuan untuk menjatuhkan pasangan calon tertentu. Hal ini terjadi jika pendukung memiliki perbedaan pilihan meskipun berasal dari suku yang sama, tetapi bisa saja terjadi perbedaan pilihan. Ada yang mendukung KSK sebagai perwakilan putra daerah Sulawesi Tenggara, namun tidak sedikit pula yang menganggap LA sebagai calon yang cocok untuk memimpin Sulawesi Tenggara, karena sudah memiliki pengalaman sebagai wakil gubernur pada masa pemerintahan Ali Mazi. Kedua sosok ini merupakan putra asli daerah Sulawesi Tenggara (bersuku Tolaki), namun terdapat perbedaan pilihan dari para pendukungnya, sehingga menimbulkan kontestasi atau persaingan politik dalam memenangkan perolehan suara pada pemilu 2024 mendatang. Fenomena ini merupakan hal yang wajar untuk menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat.

KESIMPULAN

Dalam kontestasi wacana politik identitas di ruang digital menjelang pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara, terlihat dinamika yang signifikan di media sosial, terutama Facebook dan Instagram. Fenomena kesukuan menjadi sorotan utama, menciptakan perdebatan sengit di komentar-komentar postingan yang mendukung calon gubernur berdasarkan suku. Dengan tiga calon gubernur dari latar belakang suku yang berbeda, yaitu Andi Sumangerukka, Kery Saiful Konggoasa, dan Lukman Abunawas, pemilihan gubernur tahun 2024 tampaknya akan dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kesukuan. Public mindset mengenai kesukuan di Kota Kendari menjadi faktor kunci dalam menentukan peta kekuatan politik dan calon gubernur yang dianggap paling cocok untuk memimpin Sulawesi Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryojati Ardipandanto (2017). Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 : Strategi Politik Kandidat *The Election Of Governor Of Dki Jakarta 2017 : Candidate Politics Strategy*, 1.2
- Indah Sari (2020). Politik Identitas Komunitas Bali Di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin", 1.1
- I Putu Sastra Wingarta, dkk (2021). Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*. Vol. 9 No. 4.
- Hasil Survei Terbaru Calon Gubernur Sulawesi Tenggara di Pilgub Sultra 2024, 21 Nama Figur Teratas, dalam <https://sultra.tribunnews.com/2023/02/15/hasil-survei-terbaru-calon-gubernur-sulawesi-tenggara-di-pilgub-sultra-2024-21-nama-figur-teratas>, Diakses 03 Oktober 2023.
- Luik Jandi (2020), *Media Baru, Sebuah Pengantar*. Jakarta : Prenadamedia.
- Muhtadi, B. (2019). *Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral : Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*. Malang : Intrans Publishing.
- Nasrullah, Rulli (ed). (2017), *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya dan Siosoteknologi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Pendukung Andi Sumangerukka di Pilgub Sultra 2024 Semakin Meluas, dalam <https://www.beritarakyat.id/pendukung-andi-sumangerukka-di-pilgub-sultra-2024-semakin-meluas/> , Diakses 05 Oktober 2023.
- Rozi, S & Noer, F (2019), *Politik Identitas : Problematika dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan di Aceh, Riau, Bali dan Papua*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Tabroni, R (2022), *Komunikasi Politik pada Era Digital*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Sutrisno (2016). Pilkada DKI JAKARTA 2017", *Journal Information*, volume 10.7
- Simpatian dan Relawan ASR Antusias Hadiri Silaturahmi dengan Andi Sumangerukka, dalam <https://zonasultra.id/simpatian-dan-relawan-asr-antusias-hadiri-silaturahmi-dengan-andi-sumangerukka.html> , Diakses 09 Oktober 2023.
- Xenia Angelica and Lestari Nurhajati (2019).Framing Media Online Atas Pemberitaan Isu Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pencapaian Keberhasilan SDGs Indonesia", 3.1 <https://sultrakini.com/andi-sumangerukka-dapat-dukungan-dari-masyarakat-abeli-nambo-dan-poasia/>